

KESELARASAN ANTARA RPD DENGAN RENSTRA
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

RPD				RENSTRA										KINERJA PROGRAM							KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBUJUKAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN 2025	TARGET 2026	REALISASI CAPAIAN 2026	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	TARGET 2024	REALISASI CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN 2025			TARGET 2026	REALISASI CAPAIAN 2026
Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi	Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital	Mewujudkan Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai AKIP DKPPP	88	79,48	90	-	96	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah. 2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah.	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
															Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
															Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah. 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah. 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 3. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan. 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 6. Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD. 7. Pengadaan Mebel 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 9. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
															Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	-	100%	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat	Peningkatan Pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman hidroponik	Mengendalikan Laju Inflasi	Laju Inflasi	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	0.81%	1.54%	1.50%	-	1.50%	-	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Stabilisasi Harga Pangan	5.71%	<5%	4.45%	<5%	0.00%	<5%	0.00%	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
															Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,94%	88,50%	91,53%	89,00%	0.00%	90,0%	0.0%	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
														Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	80.58%	87,00%	100.00%	87,50%	0.00%	88.00%	0.00%	1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. 2. Penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	1. Penyusunan, Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. 2. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
														Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	84.00%	88,50%	0.00%	89,00%	0.00%	90.0%	0.00%	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota
														Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Ikan Konsumsi	1.910 ton	1.974,79 ton	1985,4 ton	1.994,54 ton	-	2.014,49 ton	-	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
															Jumlah Produksi Ikan Hias	22.737.661 ekor	25.361.323 ekor	25.219.625 ekor	25.614.936 ekor	-	25.871.086 ekor	-	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
														Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	89.130,50 ton	93.865,05 ton	94.818,02 ton	95.000 ton	-	97.000 ekor	-	1. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil. 2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Pembinaan terhadap penerapan Persyaratan perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai skala Usaha dan Resiko. 2. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu)daerah Kabupaten/kota
		Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor alternatif	Melalui Kemudahan Berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatkan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	1,14%	1,14%	1,15%	-	1,16%	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Hasil Komoditas Pertanian	34.250 ton	36.168 ton	24.157,85 ton	36.711 ton	-	37.261 ton	-	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. 3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota. 4. Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer. 5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain	1. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian. 2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. 3. Pengawasan peredaran bahan Pakan/Pakan, Benih/ Bibit Hijaun Pakan Ternak. 4. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan. 5. Pengadaan Benih Ternak Yang sumbernya dan Daerah Kabupaten/Kota Lain
															Jumlah Produksi Peternakan	10.765 ton	11.093 ton	10.572,02 ton	11.195 ton	-	11.300 ton	-	-	-
															Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan	3.700 ton	3.817 ton	3.821,28 ton	3.875 ton	-	3.925 ton	-	-	-

RPD				RENSTRA										KINERJA PROGRAM						KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN						PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE	INDIKATOR PROGRAM							
								TARGET 2024	REALISASI CAPAIAN 2024	TARGET 2025	REALISASI CAPAIAN 2025	TARGET 2026	REALISASI CAPAIAN 2026				TARGET 2024	REALISASI CAPAIAN 2024	TARGET 2025			REALISASI CAPAIAN 2025	TARGET 2026	REALISASI CAPAIAN 2026
														Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan zoonosis	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. 2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah kabupaten/Kota 3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu)daerah Kabupaten/kota. 2. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 3. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 4. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
														Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan produk Hewan yang bersertifikat teknis		65 unit	80 unit	86 Unit	85 unit	-	90 unit	-	-	-
														Persentase produk PAH yang ASUH		44%	45,20%	45.63%	45,40%	-	45,50%	-	-	-

Bekasi, 07 Januari 2025

 Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan Kota Bekasi
H. A. S. W. Panjaitan